

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA PALOPO

Didik Iskandar¹, Ramlawati Jabbar²

¹Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Hasanuddin

Email: didik.iskandar27@gmail.com

² STISIP Veteran Palopo

Email: rarflaminggo@gmail.com

ABSTRACT

Implementation is tasked with forming a bond or linkage that makes it easier for policy goals to be realized as a result of a government activity. The Program keluarga harapan is an empowerment program for underprivileged communities by providing conditional cash assistance that prioritizes three main components, namely the health component, the education component and the social welfare component. This study aims to determine the implementation of the family of hope program in Palopo City . The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques, direct observation at the location, conducting interviews with several informants, and documentation. For data management techniques used data reduction, data display, and drawing conclusions. The location of this research is the Palopo City Social Service Office and the location of the beneficiary group of the family of hope program. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the family of hope program in Palopo City has not all run well based on several factors supporting the success of implementation including, policy content, policy format, and actor reputation.

Keyword: implementation, PKH,

ABSTRAK

Implementasi bertugas untuk membentuk suatu ikatan atau linkage yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberdayaan masyarakat prasejahtera dengan pemberian bantuan tunai bersyarat yang diprioritaskan kepada tiga komponen utama yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan di Kota Palopo . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi langsung di lokasi, melakukan wawancara terhadap beberapa informan, dan dokumentasi. Untuk teknik pengelolaan data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Palopo dan lokasi kelompok penerima manfaat program keluarga harapan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa implementasi program keluarga harapan di Kota Palopo belum seluruhnya berjalan dengan baik berdasarkan dari beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi diantaranya, isi kebijakan, format kebijakan, dan reputasi aktor.

Kata Kunci: implementasi, PKH

PENDAHULUAN

Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks karena melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan *delivery activities*. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan. Berbagai kegagalan implementasi kebijakan atau program pemerintah telah menimbulkan keprihatinan para ahli administrasi publik. Melalui pemahaman yang lebih tentang proses implementasi dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses implementasi yang lebih baik sehingga di masa-masa mendatang implementasi suatu kebijakan akan lebih memiliki peluang untuk berhasil dibanding dengan sebelumnya (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015).

Selama ini para ilmuwan khususnya di bidang administrasi publik cenderung berpendapat bahwa persoalan implementasi hanyalah merupakan masalah administrasi dan manajemen semata. Masalah tersebut kemudian secara sederhana dapat dipahami sebagai persoalan relasi antara berbagai unit organisasi maupun individu yang memiliki otoritas dalam hirarki organisasi. Perhatian para ahli administrasi publik dalam mengelola implementasi kebijakan kemudian hanyalah persoalan bagaimana mengurangi distorsi komunikasi tentang makna suatu kebijakan (sasaran, tujuan, dan manfaat) dari unit pimpinan organisasi yang menduduki hirarki tertinggi sampai dengan parapelaksana yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran pada level paling bawah (Goggin, et.al, 1990).

Karena kompleksitas tersebut, bukan suatu yang mengagetkan ketika lebih banyak kebijakan ataupun program pembangunan pemerintah yang gagal di implementasikan dibanding yang berhasil. Fenomena yang ditemukan di lapangan tentang banyaknya kegagalan program pembangunan pemerintah, termasuk berbagai kasus implementasi kebijakan di negara-negara berkembang. Ketertarikan ahli implementasi kebijakan dan program pembangunan di negara berkembang. Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah sulit untuk di negara kelas pertama, namun sangat lebih sulit lagi untuk dilaksanakan di negara dunia ketiga, (McClintock, 1980). Sebagai salah satu bagian dari negara dunia ketiga, Indonesia juga mengalami berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan atau program pembangunan. Contoh yang nyata tentang kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan program anti kemiskinan. Saat ini saja sangat banyak jenis program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan masyarakat prasejahtera, salah satu diantaranya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH.

Sebagai program yang diorientasikan untuk menangani problem pada klaster masyarakat prasejahtera, PKH dibentuk untuk menyoal kelompok masyarakat miskin yang berada pada level terendah. Harapannya agar mampu memutus mata rantai kemiskinan yang mengintervensi berbagai sektor, mulai dari pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini digunakan sebagai patron dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi

di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. PKH diarahkan untuk menjadi titik sentral penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sampai ke daerah-daerah. Salah satu daerah yang juga melaksanakan program PKH ini adalah Kota Palopo.

PKH di Kota Palopo mulai berjalan pada tahun 2013 dengan mencakup 4 kecamatan dengan jumlah penerima 1005 orang (Dinas Sosial Kota Palopo, 2018). Agar program ini tepat sasaran kepada objek yang dianggap betul-betul berhak mendapatkan bantuan dalam program ini, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota palopo bekerjasama dengan badan pusat statistik Kota Palopo untuk menyeleksi data keluarga miskin yang menjadi sasaran utama program ini. Namun dalam pelaksanaannya PKH yang diagendakan sebagai program prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera masih dianggap jauh dari target yang diharapkan. Selain daripada adanya kecenderungan tentang lemahnya dukungan pemerintah daerah, dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program yang diimplementasikan, juga masih terdapat faktor utama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang seringkali terjadi di hampir beberapa daerah yaitu terjadinya penyimpangan, penundaan pelaksanaan program, strategi pemecahan masalah yang cenderung lamban serta ketidakmampuan dalam menyesuaikan lingkungan objek kebijakan juga merupakan contributor terhadap kegagalan implementasi PKH sebagai solusi dalam penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Berbagai uraian masalah dalam implementasi kebijakan dan program pemerintah serta paparan tentang fenomena pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dibahas sebelumnya menjadikan perlunya dilakukan penelitian terkait implementasi program keluarga harapan. Dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses serta faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi program keluarga harapan sebagai upaya penanggulangan masyarakat prasejahtera di Kota Palopo.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin (1986) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup rangkaian tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2012).

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program. Sedangkan Grindle (1980) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi itu mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", yaitu sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai tujuan

yang telah ditetapkan (Winarno, 2012). Inti dari maksud implementasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015).

Grindle (1980) menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh hasil kebijakan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program, dan (6) Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan.

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan

otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis (Ann O'M Bowman dalam Rabin, 2005).

Implementasi kebijakan model Goggin (1990) dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi Kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumberdaya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al., 1990). Goggin (1990) mengemukakan bahwa, dalam implementasi kebijakan juga harus terfokus kepada dua perhatian utama. Pertama, tipologi permasalahan dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari penyimpangan (*defiance*), penundaan (*delay*), penundaan strategi (*strategic delay*),

taat (*compliance*). Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan seperti, Isi kebijakan (*the content of the policy message*), Format kebijakan (*the form of the policy message*), serta Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Upaya Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program

perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8% (Kemensos, 2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan sumber data dari: sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang mengaju pada pedoman wawancara yang sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder, bersumber pada hasil informasi dari orang kedua, dan dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palopo dan Pendamping serta Supervisor Program Keluarga Harapan Kota Palopo. Dalam penelitian ini instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri. Teknik penentuan sample dengan menggunakan purposive sampling, data primer juga

diperoleh dari observasi, selanjutnya data sekunder diperoleh dari Dokumentasi serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mampu memperkuat konsep dan data penelitian. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, interview, dokumentasi, menguji dan mengecek data dengan Triangulasi. Analisis data menggunakan model yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi / kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera di Kota Palopo

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palopo sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 program ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, yang pelaksanaannya menggunakan anggaran pemerintah pusat atau dialokasikan melalui APBN. Adapun jumlah penerima manfaat program ini di Kota Palopo secara keseluruhan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Jumlah Penerima Manfaat PKH di Kota Palopo Dari Tahun 2013 s/d Agustus Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	BARA	209	207	207	409	397	496	475
2	TELLUWANUA	306	299	291	680	666	809	804
3	WARA	146	141	138	266	247	321	310
4	WARA TIMUR	216	204	196	580	557	583	556
5	WARA SELATAN	0	91	92	222	213	225	219
6	WARA UTARA	0	123	124	245	230	274	266
7	MUNGKAJANG	0	0	126	223	217	224	222
8	SENDANA	0	0	163	321	309	359	351
9	WARA BARAT	0	0	176	298	286	331	316
TOTAL JUMLAH		877	1065	1513	3244	3122	3622	3519

Sumber: Tim Pendamping PKH Kota Palopo, 2018

Terdapat beberapa instrument yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi PKH di Kota Palopo sebagai bentuk kegiatan utama yang harus dilaksanakan. Diantaranya (1) proses sosialisasi, (2) penentuan kelompok sasaran, (3) bantuan dana / anggaran dari pemerintah, serta (4) proses pendampingan. Dalam proses sosialisasi, pemerintah Kota Palopo melakukan sosialisasi melalui beberapa metode diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan musrembang yang menyentuh seluruh masyarakat agar mengetahui informasi ini yang mana dimaksudkan adalah orang-orang yang menghadiri musrembang tersebut. Selain itu, proses sosialisasi juga dilakukan oleh pihak dinas sosial berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi sampai kepada tingkat RW dan RT agar penyampain program ini tersampaikan dengan baik.

Pada tahap penentuan kelompok sasaran sesuai dengan kebijakan dari PKH pusat yaitu kriteria komponen kesehatan antara lain ibu hamil dan menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun, dan untuk kriteria komponen pendidikan meliputi anak SD sampai dengan anak SMA serta anak usia enam sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, serta untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari umur 60 tahun dan penyandang disabilitas. Kesesuaian kriteria dengan calon penerima bantuan di koordinasikan antara pihak PHK, dinas Sosial serta pemerintah kecamatan sampai pada tingkat RT. Dari sisi bantuan yang diterima oleh kelompok penerima manfaat sudah sesuai dengan aturan serta petunjuk teknis pelaksanaan PKH, dimana rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.

Bantuan tetap per keluarga setiap tahun

No	Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)
1	Reguler Keluarga / tahun	550.000
2	PKH Akses/ tahun	1.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo, 2018

Terakhir, pada proses pendampingan dilakukan oleh para pendamping program PKH yang telah diseleksi melalui tahapan seleksi dan rekrutmen oleh pihak kementrian sosial dan dinas sosial Kota Palopo. Para pendamping program melakukan pengawasan kepada para penerima bantuan program agar penggunaan dana bantuan diperuntukkan sesuai dengan jenis bantuan dan jumlah biaya yang diterima. Pendampingan program PKH di Kota Palopo telah terstruktur mulai dari koordinator kota, supervisor kota, hingga pendamping di tiap kecamatan. Jadwal pendampingan yang diperuntukkan untuk pemberian arahan kepada KPM telah teragendakan setiap bulannya agar pelaksanaan program ini berjalan efektif. Namun proses pendampingan masih perlu lebih diintenskan misalnya, penambahan jadwal kunjungan para pendampingan pada tiap-tiap KPM, pengontrolan penggunaan bantuan dilakukan dengan metode monitoring yang lebih terarah dan terukur, sehingga KPM dapat lebih merasakan manfaat dan data sesegera mungkin untuk mengalami peningkatan status menjadi keluarga yang sejahtera dair sisi pendapatan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palopo

Menurut Goggin et al. (1990), implementasi kebijakan diasumsikan sebagai

suatu pesan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal utama yaitu isi kebijakan, format kebijakan, dan reputasi aktor.

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan (*the content of the policy message*) berkaitan tentang sumber daya, manfaat kebijakan, keterlibatan publik. Dari sisi sumber daya, dalam melaksanakan PKH di Kota Palopo, dapat dikategorikan berupa pemberian bantuan dana program kepada KPM yang sesuai dengan jenis komponen, serta pemberian materi dalam kaitan memaksimalkan pemahaman para keluarga prasejahtera sebagai penerima manfaat program agar bijak dalam penggunaan anggaran program serta dapat menyesuaikan dengan keperluan yang mereka butuhkan. Dari sisi manfaat kebijakan, pelaksanaan PKH di Kota Palopo tentu memberikan manfaat yang baik bagi keluarga prasejahtera khususnya bagi para penerima bantuan dana program dalam memenuhi kebutuhan mereka di bidang pendidikan yaitu penyelesaian biaya sekolah serta pemenuhan kebutuhan sekolah, bidang kesehatan yaitu pemberian bantuan bagi ibu menyusui dan anak balita, serta pada bidang kesejahteraan sosial yaitu pemberian perhatian kepada para usia lanjut dan penyandang disabilitas. Keterlibatan para stakeholder seperti perangkat Dinas Sosial, Pemerintah kecamatan dan Kelurahan sampai pada Tokoh Masyarakat mempertegas isi kebijakan PKH dari sisi keterlibatan publik.

2. Format kebijakan

Format kebijakan (*the form of the policy message*) terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, serta frekuensi dan penerimaan kebijakan. Kejelasan kebijakan dalam program keluarga harapan di Kota Palopo menyangkut soal bagaimana

pemahaman para pemangku kepentingan baik itu pemerintah serta kelompok sasaran tentang konten program yang akan dijalankan seperti kesepakatan bersama antar pendamping program dan KPM PKH tentang proses dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini. Konsistensi kebijakan berkaitan tentang kesesuaian antara apa yang telah ditetapkan sebagai target output dan outcome yang ingin dicapai dengan hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan program ini, dalam hal ini, dengan dilaksanakannya program PKH di Kota Palopo, telah terdapat KPM yang mengalami peningkatan status menjadi keluarga yang telah sejahtera walaupun belum sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

Frekuensi kebijakan dalam pelaksanaan PKH di Kota Palopo diartikan sebagai ketetapan waktu pemberian bantuan kepada KPM serta seberapa rutin pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh tim pendamping dan dinas sosial sebagai *leading sector* program. Dalam pelaksanaannya bantuan program diberikan setiap 3 bulan sekali yang mana tiap pencairannya tidak terlaksanakan pada tanggal yang sama. Jadi harus ada persiapan yang matang dari KPM untuk mengatur bantuan yang diterima agar mampu memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, pendampingan dilakukan dengan intens dan terjadwal hanya saja keterlibatan dari pihak Dinas Sosial tidak seperti apa yang dilakukan oleh pihak pendamping program di tiap kecamatan yang memang melakukan pendampingan program yang terjadwal untuk mengarahkan KPM dalam pemanfaatan bantuan program.

3. Reputasi Aktor

Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*) meliputi legitimasi dan

kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. Pentingnya legitimasi untuk mendukung reputasi para aktor juga menjadi perhatian bagi dalam pelaksanaan program PKH di Kota Palopo. Bentuk legitimasi yang diberikan tersebut berupa kewenang kepada para pendamping PKH Kota Palopo untuk melakukan pengawasan dan pengarahan untuk kemanfaatan program bagi para sasaran program. Selain pendamping PKH, para aparat pemerintah dalam lingkup Dinas Sosial Kota Palopo, khususnya yang membidangi kesejahteraan rakyat juga memiliki legitimasi yang sama dalam pelaksanaan program. Walaupun bentuk legitimasi masing dianggap kurang seperti penentuan calon penerima manfaat belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab para aktor yang berkecimpung pada program ini.

Pada sisi kredibilitas aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kota Palopo, masih terdapat kekurangan. Dalam pelaksanaannya aparat pemerintah baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Dinas Sosial masih banyak yang belum memahami orientasi tujuan dilaksanakannya program yang berbeda dengan para pendamping program yang pada saat proses rekrutmen diberikan pengarahan dan pelatihan sehingga sangat memahami esensi program. Persoalan kredibilitas lainnya adalah masih terdapat budaya paternalistik yang memprioritaskan kerabat maupun keluarga untuk didata masuk kedalam penerima bantuan program sedangkan disisi lain masih terdapat kelompok masyarakat yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan program ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di Kota Palopo, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dari sisi isi kebijakan pelaksanaan PKH di Kota Palopo yaitu sumber daya yang diberikan sudah sesuai dengan aturan program walaupun masih banyak kebutuhan masyarakat prasejahtera yang belum terakomodasi dan juga manfaat yang diterima oleh para penerima bantuan juga cukup terasa atas dijalankannya program ini, serta program ini juga melibatkan banyak stakeholder namun keterlibatannya kurang maksimal khususnya dalam penentuan calon penerima bantuan program. *Kedua*, pada format kebijakan, PKH di Kota Palopo dalam pelaksanaannya cukup jelas dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program sehingga dapat menciptakan konsistensi antara aturan yang berlaku di tingkat pusat dengan yang diselenggarakan di daerah. Selanjutnya frekuensi kebijakan program yang diterima oleh KPM terkadang berubah-ubah dan tidak tentu tgl penerimaannya sehingga perlu ada persiapan bagi para KPM untuk menanggulangi kebutuhan mereka sebelum bantuan diterima. *Ketiga*, reputasi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kota Palopo jika dilihat dari sisi legitimasi sudah sesuai, namun pada aspek kredibilitas masih perlu ditingkatkan, khususnya kemampuan para aktor yang terlibat dalam memahami esensi program agar tidak disalahgunakan pada kepentingan yang lain.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini untuk kepentingan penelitian

selanjutnya adalah. Dalam implementasi program PKH di Kota Palopo perlu ditingkatkan bantuan yang diterima oleh KPM sebagai bagian dari esensi kebijakan, selain itu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program ini harus mereka yang mempunyai kredibilitas agar tujuan pelaksanaan program ini tepat sasaran. Hal lain yang perlu menjadi masukan dalam penelitian ini adalah perlunya para stakeholder yang terlibat untuk melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh manfaat yang diterima oleh para KPM dalam pelaksanaan program ini untuk meningkatkan status mereka ke taraf yang jauh lebih baik.

REFERENSI

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media. Cetakan II.
- Ann O'M Bowman. 2005. Implementation Theory and Practice Toward A Third Generation, London: Scott Foresman and company
- Badan Pusat Statistik. 2016. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Dinas Sosial Kota Palopo. 2018. Laporan Kinerja Pelaksanaan Program Dinas Sosial Kota Palopo.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilees. 1980. Politics and policy implementation In the Third World.



Jurnal Ilmiah Pranata Edu
Volume 3 No.2, December 2021

ip-ISSN: 2656-6788 e-ISSN: 2685-0419

New Jersey: Princenton University Press.

<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

Huberman, A. Michael, & Miles, Matthew B. 1994. Data Management and Analysis Methods. Dalam Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., (editor). *Handbook of Qualitative Research*. hlm. 428 – 444. USA: SAGE Publications, Inc.

McClintoch, C. 1980. Reform Governments and Policy Implementation Lesson From Peru in Grindle, MS (Eds), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, NJ. Princenton University Press, Princento.

PKH, Kota Palopo. 2018. Rekap KPM-PKH Kota Palopo. Tim Pendamping PKH Kota Palopo.

Ripley, Randall, B., and Franklin, Grace, A. 1986. *Bureaucracy and Policy Implementation*, The Dorsey Press, Chicago Ill.